

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian Masalah**

Perbaikan pelayanan kinerja pegawai pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting karena sebagai organisasi dalam bentuk pelayanan pemerintah hal yang paling utama dilihat oleh pemerintah adalah pelayanannya, jika pelayanan suatu instansi tersebut dapat berjalan dengan baik maka masyarakat pun dapat menilai dan menerima dengan baik pula, akan tetapi jika pelayanan dalam pemerintah tersebut kurang baik atau kurang memuaskan maka masyarakat pun akan *complain* dan protes terhadap kinerja pegawai pemerintah tersebut.

Dalam bidang reformasi administrasi *public* kinerja pegawai pemerintah merupakan pembahasan yang sangat penting, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Apalagi pada tahun 2018 telah banyak kasus - kasus yang telah menyeret berbagai macam pegawai pemerintah yang ada di Indonesia sendiri, jika dibandingkan dengan Negara lain Indonesia termasuk Negara dengan angka korupsi tertinggi dengan menyeret pegawai pemerintah.

Kinerja merupakan hasil, prestasi atau nilai yang diberikan kepada pegawai atau karyawan pemerintah dengan melihat dan menimbang pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas – tugas yang telah diberikan kepadanya. Selain kinerja yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan, kinerja juga dapat dilihat dari organisasi atau instansi tersebut. Biasanya penilaian, hasil atau prestasi dalam suatu organisasi pemerintah dapat dilihat dalam satu

periode pekerjaan yang telah dilakukan oleh instansi tersebut, masyarakat dapat menilai suatu organisasi pemerintah tersebut baik atau layak dianggap berprestasi, jika organisasi pemerintah tersebut mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam satu periode atau dalam satu kontrak pekerjaannya dengan baik tanpa adanya kendala baik dari dalam organisasi tersebut maupun dari luar organisasi tersebut. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dapat diraih oleh pegawai atau pun organisasi dengan tujuan sebagai motivasi bagi rekan-rekan sesama pegawai atau bagi sesama organisasi pemerintahan. Sejalan dengan pengertian kinerja di atas Mangkunegara (2007:67) menyatakan kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Peningkatan pengembangan dan pengetahuan pegawai pemerintah sangat berperan penting dalam pemecahan masalah yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan organisasi, dalam mencapai tujuan organisasi pegawai pemerintahan diharapkan mampu untuk dapat memecahkan masalah yang mungkin akan timbul dalam kegiatan organisasi. Sehingga kegiatan organisasi tersebut mampu berjalan dengan semstinya untuk mencapai tujuan organisasi dengan menyelesaikan satu per satu kegiatan, pelayanan, tugas yang diberikan kepada organisasi tersebut. Maka dari itu pegawai pemerintah diharapkan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan visi, misi organisasi tersebut dan dengan bekal pelatihan dan pengembangan juga dapat berpengaruh dalam membentuk pegawai pemerintah yang berprestasi agar

kegiatan organisasi juga dapat terlaksana dengan semestinya. Sehingga masyarakat dapat menerima dan memaklumi jika dalam kegiatan tersebut terjadi persoalan atau kendala yang mungkin akan timbul dalam kegiatan pemerintahan tersebut, apabila persoalan atau permasalahan tersebut tidak dapat dihindari lagi dengan begitu pencapaian kinerja dapat dikatakan baik. Hal ini juga tidak terlepas dari anggaran pemerintah daerah yang diolah oleh suatu organisasi, dimana organisasi tersebut dikatakan baik dan berprestasi jika dalam pengelolaan keuangannya juga baik dan dapat dikatakan efektif jika dalam satu periode atau biasanya dalam kurun waktu satu tahun organisasi tersebut dapat mengolah keuangannya dengan baik maka, organisasi tersebut dapat dikatakan berprestasi. Suatu organisasi dikatakan layak dan baik tidak hanya dinilai melalui pelayanan dan kinerja pegawai pemerintah yang bekerja di dalam organisasi tersebut, melainkan juga dinilai melalui pengelolaan keuangan pemerintah tersebut karena di dalam suatu daerah pemerintah lah yang mengelolah kebutuhan untuk daerahnya sendiri. Sehingga dari segi penilaian faktor ekonomi ini lah yang dapat dikatakan pengaruh yang paling besar bagi suatu organisasi mana pun, faktor ini juga mendorong pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi untuk satu periode.

Anggaran merupakan satuan untuk mengukur berapa biaya yang dibutuhkan organisasi pemerintah yang diberikan di awal periode untuk digunakan satu periode kedepan. Dalam penyusunan anggaran sebaiknya seluruh pegawai dan karyawan ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran yang biasanya dilakukan pada awal periode atau awal tahun, untuk mendapatkan kinerja pegawai yang efektif maka sangat dianjurkan untuk melibatkan seluruh karyawan dan pegawai dalam

penyusunan anggaran pemerintah untuk kinerja satu periode atau satu tahun. Karakteristik anggaran juga sangat berpengaruh kepada setiap proses – proses tujuan anggaran tersebut sampai pada anggaran tersebut dapat digunakan untuk kegiatan organisasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa karakteristik anggaran dapat berpengaruh kepada variable kinerja pegawai pemerintah daerah itu sendiri. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah ( Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006). Dalam setiap organisasi *sector public* di Indonesia anggaran untuk satu periode kedepan dibahas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengajukannya kepada pemerintah pusat dan kemudian termasuk di dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), dengan kemudian dibahas dengan menteri – menteri yang bersangkutan, sebelum pemerintah daerah mengajukan anggaran untuk kegiatan dalam kurun waktu satu periode maka setiap pemerintah daerah akan membuat Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dengan kemudian diajukan kepada pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari segi pandangan teknologi, perkembangan dan peningkatan teknologi semakin pesat dengan berdampingannya kebutuhan individu manusia yang juga semakin meningkat. Perkembangan teknologi sangat dapat membantu manusia untuk menjalankan berbagai kegiatan atau pun aktivitas lainnya, sehingga adanya teknologi ini juga dapat digunakan dalam organisasi atau instansi pemerintahan dengan disesuaikan dengan kebutuhan dalam organisasi tersebut. Dengan adanya

tehnologi yang semakin canggih manusia sangat tertolong, sehingga jika diterapkan dalam suatu organisasi dapat berpengaruh positif karena dapat membantu kegiatan organisasi tersebut dan terselesaikan lebih cepat, tepat dan relevan. Hal ini juga berhubungan dengan kinerja pegawai pemerintah daerah, jika pegawai pemerintah daerah tersebut dapat bekerja dengan baik, cepat dan tepat waktu besar kemungkinan kegiatan organisasi tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan dapat meningkatkan prestasi karyawan. Hal ini sangat mendorong karyawan untuk bekerja lebih efektif agar kegiatan – kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan karakteristik, visi, misi dan tujuan organisasi tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Research Gap**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
Darmansyah (2005)	<p><b>Independen:</b> Partisipasi penyusunan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran</p> <p><b>Dependen:</b> Kinerja pegawai pemerintah daerah (Pemda).</p>	Partisipasi penyusunan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah (pemda).
Tiana (2016)	<p><b>Independen:</b> Partisipasi penyusunan anggaran, kesulitan tujuan anggaran, evaluasi tujuan anggaran, struktur desentralisasi, kejelasan sasaran anggaran dan umpan balik</p> <p><b>Dependen:</b> Kinerja pegawai pemerintah daerah (Pemda).</p>	Partisipasi penyusunan anggaran, kesulitan tujuan anggaran, evaluasi tujuan anggaran, dan struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemda, sedangkan kejelasan sasaran anggaran dan umpan balik tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai

		pemerintah daerah (pemda).
Dewa (2015)	<p><b>Independen:</b></p> <p>Partisipasi anggaran, tujuan kelas anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran</p> <p><b>Dependen:</b></p> <p>Kinerja pegawai pemerintah daerah (Pemda).</p>	Partisipasi anggaran, tujuan kelas anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah
Zahro (2016)	<p><b>Independen:</b></p> <p>Sistem informasi akuntansi</p> <p><b>Dependen:</b></p> <p>Kinerja pegawai pemerintah daerah (Pemda).</p>	Sistem informasi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemda
Kurniawan (2004)	<p><b>Independen:</b></p> <p>Sistem informasi akuntansi</p> <p><b>Dependen:</b></p> <p>Kinerja pegawai pemerintah daerah (Pemda).</p>	Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemda.

Permasalahan pada penelitian ini adalah telah banyak peneliti peneliti yang telah meneliti tentang karakteristik anggaran dan penerapan system informasi, antara lain Darmansyah (2005) dengan hasil penelitian variable partisipasi penyusunan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah (pemda). Tiana (2016) dengan hasil penelitian variabel partisipasi penyusunan anggaran, kesulitan tujuan anggaran, evaluasi tujuan anggaran, dan struktur

desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemda, sedangkan kejelasan sasaran anggaran dan umpan balik tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah (pemda). Dewa (2015) dengan hasil penelitian variabel partisipasi anggaran, tujuan kelas anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah. Zahro (2016) dengan hasil penelitian sistem informasi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemda. Kurniawan (2004) dengan hasil penelitian sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemda.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik tujuan anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah (pemda) dengan tingkat desentralisasi. Walaupun pasti akan adanya pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam organisasi tersebut, akan tetapi hal itu sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kinerja pegawai pemerintah daerah. Sehingga peneliti ingin mengangkat kasus ini dengan judul *“Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja pegawai Pemerintah Daerah Dengan Tingkat Desentralisasi Sebagai Pemoderasi”* dengan harapan setelah adanya penelitian ini sistem informasi akuntansi dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah, agar kinerja pemerintah daerah dapat meningkat dengan signifikan setiap tahunnya. Hal ini juga dapat mendorong kegiatan yang ada di organisasi dan pengaruh terhadap pihak eksternal organisasi

tersebut, karena jika kinerja pegawai pemerintah kurang memuaskan maka akan berdampak pada pelayanan dan kegiatan yang kurang memuaskan kepada masyarakat serta dapat membuat masyarakat kecewa terhadap kinerja pegawai pemerintah tersebut.

Tema yang diangkat pada penelitian ini juga berdasarkan bebrapa pengalaman dari lingkungan sekitar organisasi yang pernah penulis ketahui sehingga penulis tertarik untuk mengangkat tema ini sebagai penelitian pra skripsi, dengan harapan dapat membuka pandangan kita terhadap dunia pemerintahan yang ada di Indonesia pada saat ini.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul: **“PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN, PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN TINGKAT DESENTRALISASI SEBAGAI PEMODERASI”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk melakukan kembali terhadap karakteristik tujuan anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi dan evaluasi anggaran terhadap kinerja pegawai pemerintah dengan tingkat desentralisasi sebagai pemoderasi pada Kabupaten Demak. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah pengaruh karakteristik tujuan anggaran, penerapan sistem informasi

akuntansi dan evaluasi anggaran terhadap kinerja pegawai pemerintah dengan tingkat desentralisasi sebagai pemoderasi pada Kabupaten Demak.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pada uraian diatas maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah karakteristik tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah?
2. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah?
3. Apakah tingkat desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah?
4. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah?
5. Apakah desentralisasi mampu memoderasi tujuan anggaran terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah?
6. Apakah desentralisasi mampu memoderasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah ?
7. Apakah desentralisasi mampu memoderasi evaluasi anggaran terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas dengan disimpulkan dalam rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat desentralisasi terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah.
5. Untuk menguji dan menganalisis desentralisasi mampu memoderasi tujuan anggaran terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah.
6. Untuk menguji dan menganalisis desentralisasi mampu memoderasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah.
7. Untuk menguji dan menganalisis desentralisasi mampu memoderasi evaluasi anggaran terhadap kinerja pegawai pemerintah daerah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pegawai pemerintah di berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman dan gambaran bagi pegawai pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan prestasi mereka di dalam suatu organisasi serta juga dapat sebagai gambaran atau tolok ukur kinerja pegawai pemerintah daerah

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran bagi para atasan untuk dapat lebih mengawasi bawahannya agar kinerja dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan masukan kepada pegawai pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi prestasinya dalam organisasi tersebut agar dapat dipandang baik bagi masyarakat